



Tesis ini bertujuan untuk melakukan kajian tentang tindakan yang dilakukan oleh Polres Tuban dalam rangka pengamanan proses pelaksanaan pengamanan pemilihan Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Tuban mulai dari Tahap pendaftaran calon Bupati dan calon Wakil Bupati, Tahap kampanye dan pencoblosan, Tahap penghitungan suara dan pengumuman pemenang serta Tahap pengangkatan dan pelantikan. Bahwa dalam proses Pilkada Tuban Tahun 2006 telah terjadi unjuk rasa yang anarki dengan ditandai adanya pengrusakan yang dilakukan oleh massa secara masif terhadap infrastruktur publik maupun pribadi

Latar belakang memilih judul ini adalah adanya tantangan tugas Polisi yang semakin berat terhadap penanganan konflik Pilkada di beberapa wilayah Indonesia, khususnya adanya kerusuhan Pilkada Tuban tahun 2006. Dalam hal ini profesionalisme Polri dalam menangani proses Pilkada menjadi suatu keharusan agar proses demokrasi ini menjadi lancar dan baik sesuai dengan amanat Undang-Undang nomer 2 tahun 2002 tentang Polri, dimana Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, disini termasuk didalamnya adalah melaksanakan pengamanan dalam tahapan-tahapan Pilkada yang sangat rawan terhadap konflik antar kelompok atau pendukung masing-masing calon.

Penelitian tesis ini menggunakan metode diskriptif, yaitu menggambarkan atau melukiskan subyek dan obyek penelitian mengenai seseorang, masyarakat dan lembaga berdasarkan fakta-fakta dilapangan, penelitian juga dilakukan dengan cara melakukan kegiatan observasi dan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat, anggota polres Tuban dan beberapa tokoh politik, mengumpulkan data-data yang ada di lapangan dan dukumen-dukumen. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal antara lain : (1) Polres Tuban sudah membuat perencanaan dalam pengamanan Pilkada, termasuk mengadakan pelatihan-pelatihan, namun didalam perencanaan kurang melibatkan kesatuan atas dan samping secara maksimal (2) Predksi dan antisipasi terhadap pengamanan unjuk rasa pasca pencoblosan kurang akurat sehingga jumlah petugas dengan pengunjuk rasa tidak seimbang, sehingga Polisi tidak mampu mengendalikan massa yang berakibat massa menjadi anarki, namun disisi lain Polisi berhasil menangkap para tersangka yang melakukan pengrusakan, pembakaran termasuk pelaku yang menghasut untuk melakukan perbuatan anarki (3) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ada indikasi adanya intervensi dari pelaku politik tertentu atau salah satu calon tertentu sehingga kurang menjaga netralitas dalam menjalankan amanat undang-undang, sehingga dalam mengambil keputusan kurang menjaga keadilan, hal inilah yang menjadi pemicu adanya ketidakpuasan dari para pendukung calon yang kalah.

Kata Kuncinya :

Proses pelaksanaan pengamanan Pilkada oleh Kepolisian (Studi kasus Pilkada Kabupaten Tuban Tahun 2006)



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

PROSES PELAKSANAAN PENGAMANAN PILKADA OLEH KEPOLISIAN (Studi kasus pilkada kabupaten Tuban Tahun 2006)

ANSORI, Hasan, Samsu Rizal Pnggabean, MS

Universitas Gadjah Mada, 2008 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

ABSTRACT

The thesis has a dim that learns about the action done by Tuban Resort Police in order to keep the safety of the process on the head region and the urce region election from registration process, campaign, giving the vorce or voting, counting the result of voting and announcing the winner and appointing. In the process of the election of the head of region in Tuban in 2006 has been happened chaos with the anarcy action which was indicated by destructing every where which was done by people massively on the public and personal infra structure.

The background of coosing the title is that there is challenge for the police's duty which goes bigger to overcome the election on the head region's conflict in some regios in Indonesia, in the case the profesionalsm of the police of Republic Indonesia (POLRI) to overcome the process on the election of the head region becomes the necessity in order to the process of demonstration do well and suitable with the constitution number 2, 2002 about the police of Republic Indonesia in which they have a duty to keep the safety and orderly for the society, keep the law and give protection to the people which is included in the election of the head region because its process is easier having some confircis among the groups or candidates fell owners.

The research of this study use a descriptive methode it describes the subject or object about a person, socrety and institution based on the facts. The writer also did the research by cloing observation and interview with the prominent, the member of Tuban research police and some politicians, collected the data and document. The result of the study shows (1) Tuban Resort police has made planning on the safety of the head police included in performing the trainings but in the planning is only a little involving the upper unity and the side unity maximumly. (2) Predicted and anticipated to the safety on the chaos post giving a vote was not perfectly accurate so the number of the police and the number of demonstrators were not equal so the police could not overcome the people who has done anarcy but the police could capture the suspected who has done the destruction and the people who provoked the anarcy action. (3) The commasion of the head region election has indicated to be influenced by some politicons or on of candidates so it is influencedthe fairness to do the best one to keep the safety and fairness. This created unsatisfying from the followers wo their candidater was lost.

The Keyword :

The process on the safety of performance election of the head region by the police.